

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah tersebut merupakan istilah yang disebutkan oleh seorang ahli filsafat bangsa Yunani yaitu Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*. Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Masing-masing manusia sebagai anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ada yang sama kepentingan dan ada juga yang berbeda bisa kita contohkan dengan kepentingan yang terjadi antara penjual dan pembeli yang sering terjadi perbedaan. Perbedaan pertentangan antara kepentingan manusia tersebut dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat jika tidak adanya suatu kekuasaan atau aturan atau bisa disebut sebagai hukum yang dapat menyeimbangkan atau mengatur kepentingan yang berbeda tersebut. Hukum atau aturan yang ada dalam masyarakat dibuat untuk menjamin seseorang bahwa kepentingan diperhatikan atau dilindungi.

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan dalam mazhab sejarah dinyatakan bahwa keseluruhan hukum sungguh-sungguh

¹ E. Utrecht, 1995, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia), hlm. 5

terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat. Kepentingan masyarakat selain dijamin oleh hukum atau aturan yang berlaku juga dijamin oleh Negara. Dimana seseorang yang berkepentingan selaku pemerintah Negara menjamin kepentingan masyarakat dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kehidupan sosial dan adat istiadat, kebiasaan, agama dan kesusilaan yang telah melekat pada kehidupan masyarakat.²

Akan tetapi meskipun demikian kepentingan antar masyarakat dijamin oleh negara, masih sangat banyak sekali sengketa yang terjadi. Contoh sengketa yang semakin marak saat ini adalah sengketa kepemilikan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Perlunya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual guna menjaga kepentingan hukum agar Negara baik secara individual atau kelompok masyarakat tidak dirugikan dan jati diri bangsa tidak dilecehkan.

Pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri adalah merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.

²Imam Sjahputra, 2009, *Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni), hlm. 1

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan lingkup hak kekayaan industri dapat terdiri atas, paten dan paten sederhana, merek/merek dagang (*Trademark*) dan Indikasi Geografis (IG), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).³

Perlindungan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sangatlah penting, salah satunya yaitu perlindungan terhadap suatu merek, karena merek merupakan aset perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran banyak sekali perusahaan yang mempetahaankan merek perusahaan dengan melakukan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran atas merek perusahaan yang dimiliki perusahaan terkait. Perlindungan terhadap merek masih minim diperhatikan oleh masyarakat, sehingga masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan mereknya terutama di Indonesia. Sengketa merek dipengadilan banyak terjadi karena pembuktian menyangkut pendaftaran mereka yang dipersengketakan manakah yang terlebih dahulu dilakukan.

Pengertian daripada merek itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)

³Iswi Haryanti, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), hlm. 16

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pentingnya peranan merek itu sendiri yaitu apabila merek tersebut telah didaftarkan ke Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual, dan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk tersebut adalah asli atau original.⁴

Dalam pendaftaran merek ada merek yang harus ditolak atau tidak dapat didaftarkan dan yang harus ditolak. Merek yang tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh permohonan yang diajukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, merek yang tidak memiliki daya pembeda, merek yang telah menjadi milik umum. Sedangkan merek yang harus ditolak berupa:

Pertama, merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis. *Kedua*, merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. *Ketiga*, merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

⁴Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumi), hlm. 321

Permohonan merek yang dapat ditolak merupakan merek yang jika tidak sesuai seperti yang telah diatur dalam pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek yang berbunyi:

”merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”.

Dan dalam pasal 21 ayat 3 uum 2016 berbunyi:

”Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”

Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”), sebagai berikut:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. **Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu** oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa **sejenis**;
- b. **Merek terkenal** milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa **sejenis**;
- c. **Merek terkenal** milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa **tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu**; atau
- d. **Indikasi Geografis terdaftar**.

Munculnya kasus-kasus di bidang merek, seperti meniru, menjiplak, memalsu, mengcopy, menterjemahkan atau membonceng ketenaran merek orang lain didorong keinginan mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara-cara melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi di samping para pelanggar menggunakan celah undang-undang, juga faktor ketelitian dari petugas pendaftaran merek pada Direktorat Merek, banyak merek-merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia

kemudian berhasil didaftarkan pada Direktorat Merek oleh pengusaha di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di bidang merek antara lain adalah karena ketiadaan sarana penyaringan terhadap indikasi penyelewengan terhadap merek, khususnya merek-merek terkenal oleh Direktorat Merek maupun para konsultan hukum merek, hal ini merupakan titik lemah para pelaku hukum merek yang belum memiliki jaringan mengenai merek-merek terkenal yang mendapat perlindungan hukum secara internasional.⁵

Merek-merek yang menurut ketentuan semestinya tidak bisa didaftar ataupun harus ditolak permohonannya namun tetap didaftar oleh Direktorat Merek, bagi pemilik merek yang sah dapat mengajukan upaya perlindungan hukum melalui gugatan pembatalan pendaftaran merek maupun gugatan ganti kerugian pada mahkamah agung atau para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Salah satu alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis maupun barang atau jasa yang tidak sejenis.

⁵ Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, YPAPI, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm. 99.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan merek terkenal, namun demikian dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan kriteria-kriteria di dalam menentukan merek terkenal.

Kriteria-kriteria untuk menentukan merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Mahkamah agung dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai merek terkenal merupakan penyempurnaan Undang-Undang Merek sebelumnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam TRIPs, antara lain ketentuan Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) *mutatis mutandis* berlaku terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota (Paris Union) harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal itu didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek. Kemudian di dalam ayat (3) pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan Pasal

6 bis Konvensi Paris mutatis mutandis berlaku juga terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis.

Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek menurut Pasal 77 ayat (1) No. 20 Tahun 2016 Undang-Undang Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun dalam ayat 2 disebutkan bahwa Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan, atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Contoh kasus merek dapat kita lihat dalam sengketa merek di Mahkamah Agung dengan surat putusan Nomor 535 K/Pdt.Sus-HKI/2018 sengketa merek PT Iwan Tirta dengan PT Pusaka Iwan Tirta dengan upaya PT Iwan Tirta mempertahankan merek batik Iwan Tirta berlanjut ke Mahkamah Agung Jakarta Pusat hingga Kasasi. PT Iwan Tirta memilih mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap PT Pusaka Iwan Tirta, yaitu Perusahaan yang mengklaim sebagai pemegang ahli waris merek Iwan Tirta. Merek Iwan Tirta diambil dari nama sang maestro batik Indonesia almarhum Nursjirwan Tirtaatmadjaja atau lebih dikenal dengan nama Iwan Tirta. PT Iwan Tirta mengatakan pihaknya keberatan atas pendaftaran merek Pusaka Iwan Tirta oleh Termohon di Direktorat Merek Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Sebab PT Pusaka Iwan Tirta memiliki persamaan secara konseptual dengan merek miliknya. PT Iwan Tirta telah menggunakan dan

mendaftarkan merek Iwan Tirta jauh sebelum PT Pusaka Iwan Tirta mengajukan pendaftaran merek di Ditjen HKI. PT Iwan Tirta telah mendaftarkan merek Iwan Tirta pada 2006. Sedangkan PT Pusaka Iwan Tirta mengajukan pendaftaran merek Pusaka Iwan Tirta pada 2 Juli 2009 dan saat ini telah tergeserasi dengan No. IDM000209085 di kelas 35 dengan kelas tersebut melindungi produk jasa toko. PT Pusaka Iwan Tirta memiliki itikad tidak baik saat mendaftarkan mereknya di Ditjen KI karena dilandasi untuk meniru merek Iwan Tirta dan Logo Iwan Tirta milik Pemohon. Tak hanya itu, PT. Pusaka Iwan Tirta telah memasarkan produk batik dengan menggunakan nama Iwan Tirta tetapi yang batik yang dipasarkan menggunakan merek pusaka Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Pusaka Iwan Tirta ingin mengambil keuntungan dari kepopuleran merek orang lain.

Akan tetapi guna mendukung penelitian untuk menganalisis objek pada permasalahan yang dimaksud, Penulis telah mengusahakan untuk mendapatkan Putusan pada Tingkat Pertama di Pengadilan Jakarta Pusat, akan tetapi tidak adanya putusan yang tingkat pertama yang dimaksud, namun penulis mendapatkan Putusan Kasasi Nomor 535 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Kemudian P. Pusaka Iwan Tirta mengajukan Permohonan Kasasi dengan Eksepsi bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Iwan Tirta telah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yaitu:

Pasal 77

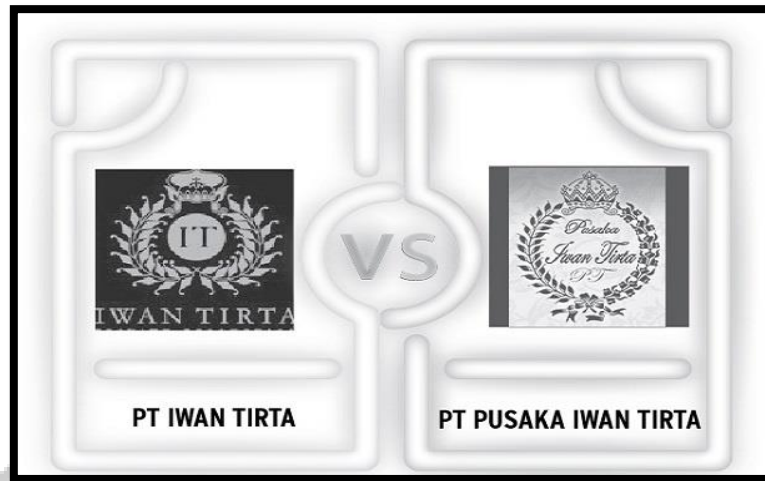
- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.

- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan, atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Akan tetapi dalam Kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang termasuk terkait dengan eksepsi bahwa gugatan telah kedaluarsa. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terkait jangka waktu gugatan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) tidak menjadi dasar hukum Mahkamah Agung untuk mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh PT Pusaka Iwan Tirta sebagai Pemohon Kasasi, menurut Penulis Mahkamah Agung mendasari pertimbangannya dengan merujuk pada Pasal 77 pada ayat (2).

Oleh karena itu, Kadaluarsa atas suatu pengajuan gugatan dapat dikesampingkan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan asas-asas. Dalam hal ini Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan asas kesusilaan atau ketertiban umum yang dijadikan Mahkamah Agung sebagai salah satu acuan untuk Putusan Kasasi tersebut.

Dokumen gambar logo PT. Iwan Tirta dan PT. Pusaka Iwan Tirta



(gambar dari tribunnews.com)

Dari sekian rumusan atau masalah-masalah diatas, penerapan UUM 2016 belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Banyaknya kasus sengketa merek dalam lingkup peniruan, pembajakan, pencurian, atau mengambil keuntungan pribadi dengan menjadi parasit merek-merek terkenal yang bersumber dari kesalahan atau kurang telitinya Direktorat HKI dalam memberikan pengawasan dan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak terkait mengenai merek, maka pengambil penulisan hukum ini berjudul **Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan** (Studi kasus sengketa merek PT. Iwan Tirta dengan Pusaka Iwan Tirta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis membahas hal tersebut lebih spesifik. Adapun rumusan masalah yang dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya sebagai indikator prinsip itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan antara merek PT IWAN TIRTA dengan PT PUSAKA IWAN TIRTA?
2. Mengapa gugatan sengketa merek antara PT IWAN TIRTA dengan PT PUSAKA IWAN TIRTA merupakan gugatan yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis telah paparkan maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya sebagai indikator prinsip itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan antara merek PT IWAN TIRTA dengan PT PUSAKA IWAN TIRTA;
2. Untuk mengetahui gugatan sengketa merek antara PT IWAN TIRTA dengan PT PUSAKA IWAN TIRTA merupakan gugatan yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Untuk menambahkan wawasan pengetahuan dan kemampuan penulis di bidang Hukum khususnya terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual terkait Hak Merek terhadap penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan.
4. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada masyarakat serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi teoretis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum merek.
- b. Dari segi praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi semua orang, terutama peminat pada perkuliahan jurusan Ilmu hukum dan sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah hukum perdata Bisnis di Indonesia serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pendalaman, pemahaman dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta berguna bagi penulis di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penelitian hukum ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis Normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelurusan terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang Merek yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.⁷

b. Pendekatan Penulisan

Pendekatan Penulisan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data,

⁶Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal.105

⁷Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni), hal,139.

atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.⁸

Dan Penulisan ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

c. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas :⁹

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu : Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pdt.Sus-HKI/2018.
- b) Bahan Hukum sekunder, yaitu : berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, jurnal hukum, putusan-putusan pengadilan terkait dengan Merek, serta disertasi-disertasi yang berkaitan tentang Merek.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus hukum, Ensiklopedia, bahan dari Internet dan media lain-lain yang merupakan bahan hukum yang

⁸Bambang Suggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm. 38

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia) hlm. 24.

memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk pisau analisa dalam rumusan masalah

d. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan data primer, data sekunder serta data terlier.

e. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode Derskriptif kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.¹⁰ Maka skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain sebagai mana data primer, sekunder dan data tersier yang berhubungan dengan judul skripsi untuk digunakan sebagai pisau analisa atas rumusan masalah yang penulis telisi.

f. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan adalah sistematika penulisan hukum yang bentuknya dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang masing-masing menjelaskan mengenai permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

¹⁰Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), hlm. 21.

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, berisi tentang tinjauan umum tentang Merek, berupa pengertian merek, fungsi merek, jenis merek, bentuk merek, subjek dan objek merek serta pendaftaran merek dan tata cara permohonan pendaftaran merek.

Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang prinsip itikad baik berupa asas itikad baik (*good faith*) dalam KUHPerdara dan itikad baik dalam UU Merek. Ketiga, berisi tentang tinjauan umum tentang kadaluarsa menurut sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia berupa kadaluarsa menurut hukum pidana dan kadaluarsa menurut hukum perdata.

Bab III : ANALISIS dan PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis mengenai unsur persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya sebagai indikator prinsip itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa di pengadilan antara merek PT IWAN TIRTA dengan PT PUSAKA IWAN TIRTA serta berisi tentang analisis gugatan sengketa merek antara PT IWAN TIRTA dengan

PT PUSAKA IWAN TIRTA merupakan gugatan yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran.

